

Keterlibatan Selebriti Sebagai Politisi: Penguatan Partai Politik atau Penggalangan Suara

Aza Rifda Khamimiya^{1*}, Agus Machfud Fauzi², Mochamad Arif Affandi³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

*Email correspondence: azarifda.21004@mhs.unesa.ac.id

Abstract: Ahead of the general election, there are more and more celebrities to enter politics. This phenomenon becomes a social reality in society when the democratic party takes place. This research seeks to discuss the rationality of parties determining celebrities as candidates for legislation and to find out the existence of celebrities in political party institutions. This research method is descriptive qualitative with case study method. The research subject is Verrell Bramasta's membership in the National Mandate Party. The data were obtained through document studies from online news and also audio-visual recordings from Narasi Newsroom and Metro Tv. To complete the data obtained by library research through e-books, and journals relevant to research. To strengthen this research, the researcher uses an analytical knife with Max Weber's theory of rationality and Bourdieu's capital. The results obtained show that the National Mandate Party is cooperating with celebrities because of social capital ownership. Party rationality makes candidates for legislators based on electoral figures. Celebrities are believed to have influence, power, popularity which can influence the party in increasing the electability of the party. Through empowering this capital, it is the main goal of the National Mandate Party to be able to defend the acquisition of parliamentary seats in the 2024 election contestation later, not because of strengthening political party institutions because the joining of celebrities is nothing but because of the persona they have.

Keywords: Verrell Bramasta; Partai Amanat Nasional; Capital; Rationality

Abstrak: Menjelang pemilihan umum kian marak selebriti untuk terjun ke dunia politik. Fenomena ini menjadi sebuah realitas sosial di tengah masyarakat ketika pesta demokrasi berlangsung. Penelitian ini berupaya untuk membahas mengenai rasionalitas partai menentukan selebriti sebagai calon legislator dan untuk mengetahui keberadaan artis pada kelembagaan partai politik. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah ketergabungan Verrell Bramasta pada Partai Amanat Nasional. Data diperoleh melalui studi dokumen dari berita online dan juga audio-visual rekaman dari Narasi Newsroom dan Metro Tv. Untuk melengkapi data diperoleh dengan studi kepustakaan melalui e-buku, dan jurnal relevan dengan penelitian. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti menggunakan pisau analisis dengan teori rasionalitas Max Weber dan modal milik Bourdieu. Hasil yang diperoleh bahwa Partai Amanat Nasional mengandeng selebriti tidak lain karena kepemilikan modal sosial. Rasionalitas partai menjadikan calon legislator berdasarkan *electoral figure*. Selebriti diyakini memiliki pengaruh, kekuasaan, popularitas yang dapat menginfluencer partai dalam meningkatkan elektabilitas partai. Melalui pemberdayaan modal tersebut menjadi tujuan utama Partai Amanat Nasional untuk dapat mempertahankan perolehan kursi parlemen pada kontestasi pemilu 2024 nanti bukan karena memperkuat kelembagaan partai politik sebab gabungannya selebriti tidak lain karena persona yang dimiliki.

Kata Kunci: Verrell Bramasta; Partai Amanat Nasional; Modal; Rasionalitas

PENDAHULUAN

Sifat demokrasi Indonesia sebagai bangsa tidak mungkin dipisahkan dari struktur politik yang dibangun atas kehendak rakyat (Kasih, 2018). Hal ini juga diungkapkan oleh J.J Rousseau, bahwa rakyat memegang kedaulatan dan rakyat tidak boleh menyerahkannya kepada raja. Rousseau percaya bahwa meskipun ada raja yang memerintah, rakyat tidak boleh menyerahkan kedaulatan kepada raja karena raja hanya dituntut untuk mematuhi kehendak rakyat semata (Arianto, 2004). Karena demokrasi menjamin bahwa rakyat akan menciptakan peraturan yang melayani kepentingan mereka dan melindungi kebebasan mereka. Maka dari itu, rakyatlah yang memegang kendali atas penyelenggaraan suatu negara. Suatu peraturan gabungan yang menopang dan menjadi landasan bagi eksistensi bangsa

tentunya diperlukan agar hal tersebut dapat terlaksana, sekaligus untuk menjaga dan memelihara hak-hak masyarakat yang hidup dalam bangsa tersebut (Noviati, 2016). Akibat pelaksanaan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, mengakibatkan terjadinya disparitas dalam sistem pemilihan umum atau dalam pemilihan yang berfungsi sebagai mekanisme partisipatif pemilihan wakil rakyat di legislatif, maka prinsip kedaulatan rakyat tidak diterima secara universal. Konsekuensinya, untuk menampung aspirasi rakyat maka dari itu diperlukan wakil rakyat (Fahmi, 2010).

Mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, memilih anggota legislatif baru melalui proses penyelenggaraan pemilu. Indonesia sebagai negara yang demokratis, maka rakyat yang memegang kedaulatan paling besar diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan umum untuk mengungkapkan preferensi mereka mengenai siapa yang harus menjadi wakil mereka di dewan (Nendissa & Rahakbauw, 2020). Tidak mengherankan bila mana hampir setiap menjelang pemilu semua partai politik berhiforia dalam menyambutnya. Bahkan diantara mereka telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk diusung sebagai bakal calon untuk maju pada kontestasi pemilu hingga menyiapkan strategi kemenangan. Hal ini juga telah tertuang pada UU No 8 Tahun 2012 Pasal 65 ayat (2) dan (3) yang menetapkan bahwa setiap partai politik yang bersaing dalam pemilu memiliki kemampuan untuk menunjuk kandidat hingga 120% dari jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemungutan suara. Perundang-undangan ini memberikan kekuatan negosiasi partai politik yang berperan penting dalam menentukan kelangsungan hidup dan kualitas calon pemimpin daerah dan nasional. Karena partai politik adalah satu-satunya organisasi yang mampu mendorong anggota masyarakat untuk bersaing memperebutkan jabatan legislatif untuk menjadi kandidat yang akan dipilih melalui suara terbanyak, maka kualitas kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu akan secara langsung dipengaruhi oleh model yang digunakan partai politik untuk memilih dan merekrut kandidat mereka (Sianturi, 2018).

Akibatnya, partai politik memainkan peran penting dalam membentuk proses dan hasil pemilu ini karena partai politik merupakan media dalam penyelenggaraan pemilu bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan duduk di lembaga negara (Arianto, 2004). Sesuai dengan visi dan misinya, setiap partai politik sebagai sebuah organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai. Partai politik berfungsi sebagai "sarana rekrutmen politik" yang menjadi salah satu dari banyak peran mereka. Partai politik terlibat dalam rekrutmen politik untuk meningkatkan keanggotaan mereka dan menarik orang-orang terampil yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pendaftaran partai politik melayani berbagai tujuan, termasuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan partai dan mengidentifikasi pemimpin masa depan. Namun, dalam proses rekrutmen yang terjadi belum sepenuhnya terpenuhi (Amin, 2018).

Keadaan ini tidak terlepas dari keinginan sejumlah pihak yang selama ini menerapkan rekrutmen dan kaderisasi. Terlebih khusus lagi, partai-partai tersebut memiliki kecenderungan untuk menerapkan pola dan gaya tradisional (Amin, 2018). Karena belum memiliki struktur sosial yang khas dan partikular serta masih mengandalkan kepribadian individu, maka partai yang berkembang saat ini lebih bersifat *catch-all party*. Hal ini disebabkan karena belum memiliki landasan sosial. Oligarki cenderung menjadi mayoritas kandidat partai politik karena mayoritas partai politik belum menetapkan metode yang efektif untuk kaderisasi secara menyeluruh (Amin, 2018). Selain itu, persoalan yang dihadapi partai politik Indonesia dapat direduksi menjadi ketidaksepakatan ideologis di masing-masing partai. Hal ini terlihat dari cara *privilese* berperilaku elit, yaitu melakukan tipu daya secara pragmatis, yang pada akhirnya menyebabkan partai tersebut terlibat dalam politik kartel. Situasi politik yang dikenal sebagai "politik kartel" terjadi ketika banyak partai politik terlibat dalam praktik memainkan konsep ekonomi metaforis dalam konteks kehidupan politik. Perdebatan ideologis, konsep, dan bahkan pernyataan tujuan tidak lagi berfungsi sebagai tolok ukur yang berarti (Ristyawati, 2019). Satu-satunya

yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan, terutama dalam hal bagaimana sebuah partai politik dapat memperoleh kursi di pemerintahan.

Tidak mengherankan jika partai politik, terutama yang tidak memiliki modal sosial yang memadai, merasa kesulitan untuk menangani calon figur ketika menggunakan strategi rekrutmen semacam ini dalam praktiknya (Mukaromah & Alfirdaus, 2022). Sesuai fakta yang ada banyak tokoh seni ternama (musisi, artis, dan pelawak) muncul dalam daftar calon potensial yang diajukan oleh partai politik. Seperti halnya Verrell Bramasta yang tergabung menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Sederhananya, bila partai politik tidak mampu memenuhi syarat ini, artinya partainya hanya akan berfungsi sebagai "penghias" dalam pesta demokrasi. Akibatnya, para partai politik bekerja keras untuk memastikan bahwa para pemimpin yang mereka kemukakan adalah yang terbaik.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu partai yang melibatkan artis dalam prosesnya sehingga banyak dilirik kalangan artis yang ingin terjun di dunia politik. Terlihat beberapa selebriti yang tergabung dalam partai ini menyalonkan diri untuk menduduki kursi parlemen. Beberapa selebriti yang tergabung dalam partai tersebut antara lain Rhorma Irama, Eko Patrio mewakili Dapil Jawa Timur VIII, Desy Ratnasari mewakili Dapil Jawa Barat IV, Primus Yustioso mewakili Dapil Jawa Barat V, Anang Hermansyah mewakili Dapil Jawa Timur IV, Marissa Haque Fawzi, Pasha 'Ungu' Wakil wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Lucky Hakim, Verrell Bramasta yang akan mewakili dapil Jawa Barat dan masih banyak lagi (Nugroho, 2018). Dari hal tersebut, menjadikan masyarakat berasumsi bahwa partai tersebut sebagai Partai Artis Nasional, sebab hampir kebanyakan kader partai merupakan seorang *public figure*. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (Puan), Keunggulan para kader yang memiliki latar belakang sebagai figur publik (*public figure*) turut dilengkapi oleh popularitas. Menurutnya, Popularitas masing-masing menjadi faktor yang sedikit banyak berkontribusi terhadap elektabilitas mereka.

Meningkatnya jumlah selebriti yang terjun ke ranah politik adalah contoh utama dari modal yang dianggap Bourdieu sebagai landasan dominasi dan legitimasi. Modal tersebut diposisikan dan beroperasi di dalam habitus, yang berfungsi sebagai pedoman baik untuk tindakan maupun kategorisasi dan domain (*arena*) (Mustikasari et al., 2023). Pembentukan habitus terjadi sebagai hasil pengalaman individu dalam hubungannya dengan orang lain dalam jaringan struktur objektif yang hadir dalam ruang sosial (Mustikasari et al., 2023). Menurut apa yang dikatakan Max Weber tentang bagaimana rasionalitas seseorang dapat disimpulkan dari perilaku sosial yang dia lakukan. Menurut pendapat Weber, keunikan dan pengetahuan subjektif seseorang tentang dirinya terkait erat dengan konsep rasionalitas. Menurut Weber, perilaku rasional terkait dengan pertimbangan sadar dan memilih tindakan yang dianggap tepat (Moita et al., 2018). Konsep bahwa tindakan individu mengarah pada suatu tujuan, dan bahwa tujuan itu sendiri ditentukan oleh nilai atau pilihan seseorang, adalah prinsip utama dari kerangka teoretis ini.

Oleh karena itu, pembentukan habitus melalui pengalaman individu akan menghasilkan pembentukan domain dan perkembangan praktik sosial ketika modal terlibat dalam proses tersebut. ranah menjadi arena kekuasaan yang di dalamnya terjadi perebutan sumber daya (modal) dan juga untuk mendapatkan akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan (Plaituka et al., 2018). Di arena kekuasaan ini juga terjadi perebutan akses khusus yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Kehadiran dunia tidak hanya menyediakan arena di mana kekuasaan dapat dilaksanakan, tetapi juga medan pertempuran di mana para aktor bersaing untuk mendapatkan tempat di dalamnya. Di tingkat dapil, arena politik menjadi kenyataan di mana terjadi konflik antar pemain yang diperjuangkan untuk menguasai sumber daya modal yang dapat diakumulasikan untuk mencapai dominasi politik. Pertarungan ini tentang siapa yang akan menguasai sumber-sumber modal tersebut. Status seseorang di ranah sangat ditentukan oleh seberapa baik mereka menguasai modalnya (Plaituka et al.,

2018). Akibatnya, modal memainkan peran yang sangat signifikan di ranah. Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa hierarki dalam ruang sosial tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki seorang aktor, tetapi juga oleh struktur modal itu sendiri (Ni'mah, 2015).

Menurut Bourdieu, ada berbagai macam modal yang tersebar di ranah sosial. Bentuk modal tersebut meliputi modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik (Jannah, 2023). modal ekonomi terdiri dari alat produksi (mesin, tanah, dan tenaga kerja), bahan (pendapatan dan komoditas), dan uang yang serbaguna dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Modal ekonomi juga diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bourdieu, 1995). Jumlah kemampuan intelektual individu yang mungkin diperoleh melalui sekolah formal atau diturunkan melalui keluarga; ini dikenal sebagai modal budaya. Ini terdiri dari modal budaya, yang terdiri dari kapasitas untuk memamerkan diri di depan umum, kepemilikan benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan kompetensi khusus yang diperoleh melalui hasil pendidikan, serta kredensial (gelar sarjana) (Bourdieu, 1995). modal sosial didefinisikan sebagai jaringan sosial yang dimiliki seorang aktor dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kekuasaan (Bourdieu, 1995). Modal simbolik, di sisi lain, mengacu pada semua jenis prestise, posisi, otoritas, dan legitimasi yang berbeda. Semakin banyak akumulasi satu jenis modal seseorang, semakin besar peluang untuk mengkonversi antar bentuk modal (Bourdieu, 1995).

Melibatkan selebriti untuk meningkatkan citra partai politik. Selaras dengan “Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik” penelitian Resty Nabilah dkk (Nabilah et al., 2022). Artis sering dinominasikan oleh partai politik untuk tujuan pragmatis yang mendesak. Hal ini karena artis harus memenuhi prasyarat tertentu agar dapat diterima dengan cepat oleh pemilih. Hal ini disebabkan fakta bahwa artis atau selebriti memiliki modal sosial dan finansial yang membuat mereka lebih mudah mendapatkan kemenangan daripada bagi kader yang mungkin harus berusaha lebih keras. Terlebih di era digitalisasi saat ini, dengan pemanfaatan media sosial memang memberikan peluang bagi para pelaku politik untuk dapat menarik pemilih, berkomunikasi langsung dengan publik, dan menciptakan percakapan yang “akrab” dengan publik. Semua peluang ini dimungkinkan berkat aksesibilitas media sosial (El-Haddad, 2013). Oleh sebab itu, partai politik memanfaatkan peluang ini dengan menggandeng selebriti.

Partisipasi selebriti adalah bukti lebih lanjut bahwa tidak ada prosedur perekrutan yang efektif. Jika partai politik dapat secara efektif menjalankan fungsi perekrutan anggota baru, seharusnya mereka tidak membuang waktu untuk menggotong para selebriti (Aziz & Tamala, 2019). Masyarakat akan lebih sulit memilih partai politik yang mereka yakini memiliki peluang terbesar untuk melindungi atau memajukan kepentingan mereka ketika para partai politik yang terlibat dalam perilaku ini. Dengan bertambahnya jumlah partai politik, semakin tidak mungkin ada satu partai yang akan memenangkan pemilu secara langsung. Karenanya, partai politik tidak segan-segan merekrut calon selebriti guna mendulang suara. Situasi ini mengakibatkan rusaknya reputasi partai akibat krisis kepercayaan di kalangan legislator dan lembaga politik ketika institusi dan individu menjadi sorotan publik (Nabilah et al., 2022). Fenomena selebriti sering diusung untuk mencalonkan diri di legislatif, meskipun mereka tidak tahu kapasitas mereka. Mereka belajar apa yang mereka ketahui tentang politik dan peran mereka sebagai wakil rakyat selama masa pembekalan dari partai. Hal tersebut terlihat bahwa kaderisasi tidak berjalan. Untuk memastikan bahwa tokoh atau kandidat terkenal dengan elektabilitas yang cukup untuk memenangkan pemilihan akan selalu memiliki keunggulan dibandingkan anggota partai yang kurang dikenal tetapi memiliki kualifikasi yang sama (Ekowati, 2019). Sama halnya jika calon yang diusulkan hanya mengajukan caleg berdasarkan elektabilitas dan reputasinya. Mencermati informasi yang disajikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Keterlibatan Selebriti Sebagai Politisi: Penguatan Partai Politik atau Penggalangan Suara”. Hal yang menjadi persoalan utama dari penelitian ini yaitu menyangkut alasan di balik pemilihan tokoh-tokoh Partai Amanat Nasional (PAN)

dalam menentukan selebriti sebagai legislator dan bagaimana keberadaan artis pada kelembagaan partai politik yang akan dianalisis menggunakan teori rasionalitas Max Weber dan modal dari Bourdieu.

METODE PENELITIAN

Studi kasus digunakan sebagai bagian dari teknik penelitian kualitatif untuk penelitian ini. Tujuan teknik penelitian kualitatif adalah menyatukan realitas dan memahami signifikansinya dengan berfokus pada orang-orang yang secara aktif terlibat dalam situasi sosial. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas data (Somantri, 2005). Studi kasus, di sisi lain, adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengamatan dan analisis ekstensif satu contoh. Arikato (1986) mengemukakan bahwa teknik studi kasus adalah semacam strategi penelitian deskriptif yang dilakukan secara intens, mendetail, dan mendalam terhadap seseorang, lembaga, atau gejala tertentu dengan tema yang terbatas (Gunawan, 2013). Selain itu, tujuan studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif dan mendalam tentang latar belakang masalah serta keadaan saat ini mengenai kejadian yang sedang berlangsung.

Dalam studi kasus ini, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang fenomena Verrell Bramasta, pendatang baru di dunia politik melalui berbagai sumber untuk mengumpulkan data. Studi dokumen surat kabar online dan audiovisual dari acara harian Narasi Newsroom pada episode “Artis Masuk Partai, Pakar: Kekuatan Persona Diutamakan daripada ideologi” dan acara harian Kontroversi di Metro tv episode “Artis Nyemplung Ke Politik, Udah Ga Laku?” digunakan sebagai data primer. Selain itu, untuk melengkapi informasi dan menyempurnakan data penelitian yang nantinya menjadi data sekunder, data dikumpulkan melalui studi literatur jurnal yang relevan dengan penelitian, berita online, dan buku elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalitas Partai Amanat Nasional dalam Menentukan Calon Legislator

Berdasarkan rasionalitas partai politik, Dalam hal ini, partai dapat menentukan dan menetapkan siapa yang berhak menjadi calon pimpinan daerah dan provinsi berdasarkan keputusan bersama partai dan dengan mempertimbangkan kualitas calon yang masuk dalam kategori yang memenuhi syarat dan bersungguh-sungguh ketika menjadi kepala daerah dan dapat menjalankan programnya dengan baik untuk kemaslahatan rakyat (Putra, 2022).

Cara berpikir yang membantu orang memilih atau mengevaluasi tindakan terbaik dalam politik dengan menggunakan fakta politik untuk mengantisipasi keuntungan langsung dan jangka panjang dikenal sebagai rasionalitas politik. Ini adalah proses mental yang berlabuh pada keadaan politik yang harus dihadapi seseorang dan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dari keputusan seseorang. Rasionalitas politik mengacu pada penggunaan kemampuan seseorang untuk meningkatkan keuntungan yang diterima seseorang dari berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekrutmen untuk memilih kandidat yang tepat yang akan disajikan kepada pemilih. Padahal, pelaksanaan rekrutmen politik merupakan fungsi strategis yang diemban partai politik dalam kerangka proses demokratisasi yang lebih luas (Yusra et al., 2022).

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh organisasi politik dipandang sebagai suatu cara memilih, menyeleksi, dan menunjuk warga negara untuk diangkat sebagai calon untuk menjadi pemimpin masa depan dalam sistem politik dan pemerintahan (Mukaromah & Alfirdaus, 2022). Hal ini juga telah tertuang pada Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi rekrutmen sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Richard S. Katz dan William Crotty percaya bahwa hal terpenting yang dilakukan partai politik adalah mencari kandidat potensial untuk mencalonkan diri di badan legislatif masing-masing. Ada dua faktor yang berkontribusi terhadap pentingnya hal ini. Pertama-tama, berbagai tingkat proses pendaftaran pencalonan yang dilalui partai politik untuk memutuskan siapa yang akan diajukan untuk pencalonan saat pemilihan umum dilakukan. Sebab, pemilih di Indonesia hanya memiliki pilihan untuk memilih calon yang diajukan oleh partainya sendiri dalam pemilihan umum, tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon anggota legislatif memiliki kualitas yang memadai harus diletakkan tepat di tangan berbagai pihak politik. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memilih kandidat yang memenuhi syarat untuk kursi parlemen harus berada di pundak otoritas partai politik. Kedua, tahapan dalam proses organisasi politik yang paling banyak melihat persaingan (*rivalry*) adalah tahapan rekrutmen calon. Hal ini disebabkan tingkat keseriusan caleg di internal partai yang berkontribusi terhadap perolehan suara kumulatif partai politik, dan sistem pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka dan mengonversi suara terbanyak akan langsung menentukan caleg mana yang akan memenangkan pemilu dalam memperoleh kursi di parlemen. Hal ini karena surat suara terbanyak akan dikonversi dalam pemilihan dengan menggunakan metode proporsional terbuka.

Menjelang pemilihan umum, mayoritas partai politik melakukan berbagai strategi untuk mencari dukungan. Lebih jauh lagi, pentingnya modal politik menunjukkan bahwa peran partai tidak terlepas dari perannya sebagai pintu masuk calon, khususnya kader nonpartai, dan bahwa partai yang ada dapat memberikan celah untuk menemukan tokoh-tokoh yang dianggap mampu bersaing, khususnya dalam urusan dukungan dan dana politik (Supriyanto, 2016). Tujuan partai politik adalah untuk memenangkan pemilihan sebagai rasionalitas tindakan, dan mereka melakukannya dengan berbagai cara, seperti hanya merekrut selebriti. Pilihan-pilihan partai politik ini menunjukkan pragmatisme kepraktisan politik yang lebih besar daripada etika politik. Rasionalitas pragmatis ini muncul karena partai politik membutuhkan dukungan untuk mendapatkan suara pemilih yang semakin banyak dari warga. Di sisi lain, untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan anggota legislatif, kandidat diwajibkan untuk bergabung dengan partai politik. Dalam parameter pembahasan ini, merupakan hubungan yang bersifat resiprokal dan dilatarbelakangi oleh rasionalitas instrumental. Keberadaan kejadian ini memberikan kepercayaan pada deskripsi teoretis Max Weber tentang hierarki rasionalitas yang mendasari perilaku manusia.

Realitas pemilihan calon legislator untuk fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal politik coast dan *electoral figure*. Mendapatkan kekuasaan dalam berbagai aparatur pemerintahan memunculkan pembentukan partai politik. Menurut teori Sigmund Neumann, yang menggambarkan partai politik sebagai "organisasi artikulasi dalam masyarakat" di mana kelompok-kelompok dengan berbagai sudut pandang berbeda bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat, keadaan politik saat ini konsisten dengan teori ini (Sitompul, 2018). Pemikiran yang dikemukakan Neumann sebelumnya bermaksud untuk mengimplikasikan bahwa setiap partai politik, terlepas dari ideologi yang mendasarinya, berjuang untuk hal yang sama, yaitu memperjuangkan dukungan rakyat dalam pemilihan sehingga mereka dapat menduduki jabatan politik dalam pemerintahan.

Tentunya untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan tidak lepas dari keberadaan seorang pemimpin. Menurut Neumann, fungsi partai politik adalah menyediakan sarana rasionalitas bagi para pemimpin partai politik untuk memilih calon untuk posisi anggota legislatif. James Coelman, pendiri teori pilihan rasional, yang menegaskan bahwa orang berperilaku dengan cara yang sengaja diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (Sastrawati, 2020). Oleh karena itu, memperoleh dukungan dari masyarakat luas ketika memilih calon anggota legislatif, tujuan utama para pemimpin partai politik adalah untuk memastikan bahwa partai mereka berhasil mendapatkan posisi di pemerintahan.

Tidak diragukan lagi akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya politik untuk mencapai tujuan mendapatkan kursi di parlemen. Para ketua partai politik sangat menyadari pentingnya sumber daya politik, terutama dukungan finansial untuk menutupi biaya politik partai (Chandra & Ansori, 2019). Sebelum kontestasi, parpol biasanya menghadapi dua kondisi: (a) parpol tidak siap menyediakan pembiayaan politik menjelang pemilu, dan (b) parpol selalu mengalami degradasi figur yang disebabkan oleh berbagai variabel, salah satunya pergeseran figur partai ke partai lain. Untuk meminimalkan hal tersebut, partai mulai merekrut selebriti, sebab selebriti memiliki modal sosial. Keterlibatan artis untuk terjun ke kontestasi politik tidak lain karena memiliki popularitas di masyarakat. Popularitas ini mampu mempengaruhi masyarakat untuk memilih selebriti pilihannya.

Seperti yang kita ketahui gerakan politik saat ini memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan popularitas daripada kualitas, terutama dalam hal kebijakan. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada nasib bangsa dan prospeknya ke depan. Pengakuan publik saja tidak cukup menjadi modal dalam mengubah situasi bangsa saat ini, apalagi jika tidak diikuti dengan strategi dan langkah nyata untuk memperbaiki persoalan yang dihadapi bangsa (Hamiruddin, 2021). Peralihan dari era industri ke era informasi tidak dapat dilepaskan dari gerakan politik ke ranah penerimaan publik. (Hamiruddin, 2021).

Hobbe-Nietzschean adalah istilah yang digunakan dalam studi sosial untuk menggambarkan orang yang ingin terkenal di tempat umum. Bahkan kita sering menjumpai partai politik yang membuat pernyataan-pernyataan tentang kepemilikan kepribadian nasional mereka. Memang komunikasi politik yang sarat dengan iklan, baliho, dan spanduk di samping pernyataan politik lainnya berhasil meningkatkan pengakuan. Alhasil, hal ini berdampak domino pada berbagai politisi lainnya yang tengah menginisiasi strategi untuk meningkatkan elektabilitasnya sendiri, dan karena itu menjadi *snowball effect*. Medioker adalah seorang individu yang tidak memiliki akomodasi politik dan memiliki tingkat popularitas yang rendah atau "miskin secara politik". Tetapi kita tidak dapat menyangkal kenyataan bahwa politik lebih dari sekedar memenangkan hati dan pikiran rakyat; itu juga membutuhkan kepatuhan pada standar tertentu dan kemauan untuk beradaptasi (Hamiruddin, 2021).

Akibatnya, dalam arena politik, popularitas telah berkembang menjadi penarik tersendiri. Keberadaan partai politik di Indonesia telah melahirkan praktek perebutan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh popularitas seseorang untuk mendongkrak elektabilitas partai. Akibatnya, tidak mengherankan jika partai-partai politik saling bersaing untuk memberikan penawaran kepada individu-individu yang dianggap memiliki tingkat pengakuan yang tinggi, baik di kalangan tokoh, pejabat, advokat sosial, pengusaha, atau anggota manapun. pekerjaan lain (Suardi, 2017). Hal ini dikarenakan dalam sistem demokrasi pemerintahan menjadihal krusial terlebih ketika pemilihan legislatif. Pemilu legislatif tidak hanya mensyaratkan parpol untuk mendapatkan suara agar memenuhi syarat tolak ukur parlemen, tetapi juga mensyaratkan parpol untuk menempatkan wakil dari partainya masing-masing pada posisi otoritas (parlemen) (Akbar, 2021).

Melibatkan selebriti dalam partai politik bertujuan untuk mendulang suara partai mereka sehingga lolos dari *parliamentary threshold*. Strategi mencalonkan banyak artis-artis tampaknya merupakan satu-satunya cara yang dapat mendongkrak suara partai mereka. Hal itu mereka lakukan karena beberapa alasan, salah satunya adalah agar partainya tetap eksis "hidup" dan tidak sekadar "menghiasi" arena politik di Indonesia (Habibie, 2009). Karena mudah merekrut partai politik jika calon memiliki kekuasaan di daerah dengan dukungan publik yang kuat, hal ini setara dengan pragmatisme politik melalui proses rekrutmen partai politik yang seringkali hanya mengutamakan daya tarik dan elektabilitas (Ekowati, 2019). Akibat langsung dari hal itu, tidak sedikit pengurus partai yang dianggap kompeten kehilangan kesempatan untuk ikut serta. Hal ini disebabkan mereka kalah dalam pemilu oleh tokoh atau pesaing yang memiliki elektabilitas tinggi untuk menang. Akibatnya, ada

sejumlah besar rekan partai yang dianggap kompeten tetapi tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi.

Partai politik, dalam kapasitasnya sebagai kelompok terstruktur, berkontribusi pada kemampuan untuk melakukan kontrol atas pemerintah dan menjalankan kebijakan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa partai politik adalah satu-satunya entitas yang berhak menunjuk calon untuk posisi kepemimpinan dalam pemilihan umum (pemilu). Masyarakat telah memberikan tanggung jawab kepada parpol untuk mencalonkan calon yang berkualitas dalam pemilu dan menjalankan visi dan tujuan yang telah diikrarkan kepada masyarakat. Kewenangan ini diberikan kepada partai politik oleh masyarakat (Khotimah & Muwahid, 2022). Dalam hal ini tentu menjadikan peluang para partai untuk menaikkan elektabilitas partainya, salah satunya dengan merekrut selebriti.

Konsekuensinya, kinerja elektoral calon legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi dasar pemikiran pimpinan partai dalam menentukan calon legislator. Teori modal sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu memberikan kepercayaan pada proposisi ini. Menurut teori ini, tingkat status sosial seseorang dapat disimpulkan dari jaringan koneksi pribadi dan profesionalnya. Motivasi utama di balik pembentukan organisasi politik adalah aspirasi untuk menjalankan otoritas atas berbagai lembaga pemerintahan. Kontribusi Sigmund Neumann terhadap pemikiran politik sejalan dengan realitas politik tersebut. Ia mengatakan, partai politik sebagai organisasi yang menyuarakan gagasan di masyarakat, terdiri dari orang-orang yang ingin menguasai pemerintah dan bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat, serta kelompok lain yang berbeda gagasan (Lindawati, 2014).

Menurut garis pemikiran Neumann, setiap partai politik, terlepas dari ideologi yang mendasarinya, berjuang untuk hal yang sama dan bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam pemilihan agar mereka dapat menduduki posisi politik dalam pemerintahan. Pemikiran ini sejalan dengan sikap Partai Amanat Nasional tentang partisipasi selebriti dalam politik dirasa mampu dalam memenagankan kursi parlemen. Karena mereka percaya bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi kandidat sukses untuk posisi perwakilan. Selain itu, tingkat modal sosial caleg menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan saat memilih seseorang untuk menjabat di lembaga legislatif. Sebagai akibat dari tekanan yang ditempatkan pada partai politik untuk mengamankan jumlah suara tertinggi yang mereka dapat dalam kompetisi pemilu, para pemimpin partai mulai mempertimbangkan tingkat kelebihan kepemilikan modal sosial kandidat ketika membuat keputusan pemilihan kandidat. Oleh karena itu, jika seseorang kekurangan modal ekonomi, tetapi kuat dalam mekanisme sosial, maka pengurus partai akan menjadikan individu tersebut sebagai prioritas. Keyakinan bahwa pemilih menempatkan mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah sumber modalitas sosial, yang merupakan jenis modalitas. Politisi biasanya membutuhkan banyak waktu untuk mendapatkan kepercayaan publik karena kepercayaan publik dikembangkan melalui proses yang panjang. Dalam hal ini, Partai Amanat Nasional memanfaatkan penampilan personalitas karena masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi pada selebritis.

Keterlibatan artis pada Partai Amanat Nasional sering menjadikan selebriti sebagai kandidat calon legislatif yang berhasil didekati yaitu Verrell Bramasta. Verrell Bramasta yang merupakan seorang actor yang saat ini sedang mencapai puncak popularitas, banyak fans dari kalangan muda yang mengandrungi anak Venna Melinda ini. Pada sebuah wawancara dengan awak media mengakui bahwa keikutsertaannya dalam Partai Amanat Nasional (PAN) berasal dari keinginan nya sendiri dan berkoordinasi langsung wakil ketua Partai Amanat Nasional. Keinginan yang ingin seperti orang tua kandungnya dan membantu masyarakat cukup besar.

Bermula dari membicarakan hal-hal politis dan ketertariknya untuk terjun pada dunia politik tersebut bersamma dengan Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) dapat mengerti hal tersebut lalu diberikanlah tawaran menjadi bagian organisasi sayap

milennials PAN. Setelah menerima keputusan tersebut dan rencana pada Pemilu 2024 menyalonkan anggota legislatif dari daerah pilihan Jawa Barat. Dari sini kita dapat melihat bahwa Verrell memasuki arena politik tidak lain karena adanya modal sosial berupa jaringan. Modal jaringan dari keluarga yang terlibat di birokrasi pemerintah

Menurut pandangan Bourdieu, jumlah modal sosial yang dimiliki individu tidak hanya bergantung pada ukuran jaringan koneksi yang dapat mereka atur, tetapi juga pada jumlah modal ekonomi, budaya, dan simbolik yang dimiliki oleh individu-individu yang menjadi koneksi mereka. Akibatnya, Bourdieu membagi modal sosial menjadi dua bagian: pertama, hubungan sosial, yang memberi orang akses ke sumber daya yang dimiliki bersama; dan kedua, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut. (Amsariah, 2022). Pada akhirnya, Bourdieu menganggap modal sosial sebagai investasi yang dilakukan oleh kelas yang diistimewakan untuk mempertahankan dan menyebarkan kerja sama kelompok serta mempertahankan posisi hegemonik kelompok.

Senada dengan itu, Formapi menegaskan kepada pembawa acara harian Kontroversi "Calon Artis Biar Laris" bahwa seseorang membutuhkan dua modal, yaitu modal sosial dan modal ekonomi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sementara itu, popularitas menjadi modal sosial. Modal popularitas salah satu faktor yang menguntungkan untuk para parpol untuk menggait suara, maka dari itu parpol memanfaatkan modal ini untuk menaikkan suara saat pemilu nantinya. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa modal yang dimiliki Verrell Bramasta beragam, antara lain modal sosial berupa jaringan serta modal yang berasal dari popularitasnya sebagai selebriti. Serupa dengan jawaban dari Nicholas anggota DPR RI Fraksi PDIP dalam acara kontroversi bahwa ketenaran seorang artis akan membantu ketika turun ke lapangan untuk melakukan kampanye. Maka dari itu, habitus yang diciptakan tersebutlah seorang selebriti mampu mengkonstruksikan untuk meraih kemenangan.

Melalui kemampuan personal seorang actor inilah yang kemudian diyakini dapat mempengaruhi masyarakat terutama kaum milenial untuk mendukungnya (Plaituka et al., 2018). Hal ini tidak lain karena selebriti yang telah mencapai tingkat ketenaran dan stabilitas keuangan tertentu muncul sebagai keuntungan bagi partai politik guna mengumpulkan suara. Banyak organisasi politik, tokoh terkemuka, atau pekerja yang tidak memiliki akses substansial ke sumber daya keuangan percaya bahwa mereka akan mendapat manfaat dari perkembangan ini karena mereka yakin akan dapat memperoleh manfaat darinya. Di satu sisi, mereka tidak berusaha keras untuk mencalonkan individu dan karena itu tidak mengeluarkan banyak uang. Di sisi lain, untuk lebih maju dalam proses pencalonan jabatan kepala daerah, dibutuhkan figur dengan elektabilitas dan karakterisasi yang tinggi. Sebagai akibatnya, kebutuhan untuk memenangkan konflik digabungkan dengan kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan uang seseorang. Dari sini juga jelas bahwa partai-partai politik menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada kepentingan realistik mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan. Organisasi politik tidak menyadari bahwa ideologi mereka sedang digadaikan secara perlahan tapi pasti, tetapi ini tetap terjadi. Selain itu, ada kemungkinan skuad direlokasi atau dihilangkan sama sekali.

Namun jika dilihat dari modal budaya, Verrell Bramasta memiliki track-record latar belakang Pendidikan yang baik. Verrell Bramasta berkuliah di Universitas Pelita Harapan walaupun sempat terhendiri, tapi berembus kabar kalau Verrell Bramasta dalam waktu dekat akan melanjutkan kuliah di Columbia University New York. Dengan capaian tersebut, terlihat jelas bahwa kuantitas modal budaya yang dimiliki memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, Verrell telah membangun modal simbolik, dengan dicitrakan sebagai artis yang berkompentensi dan memiliki banyak prestasi. Karena sering memerankan senetron hingga film, tidak mengherankan bila banyak prestasi yang didapatkan di dunia hiburan. Prestasi-prestasi yang didapkatnyapun terbilang bergengsi. Adapun prestasi Verrell tidak lain sebagai awards actor pada film- film yang dibintanginya.

Beberapa wawancara yang dilakukan tim acara kontroversi kepada masyarakat mengenai “kesetujuan posisi wakil rakyat dari artis”, hampir mayoritas menyetujui artis terlibat di dunia politik namun juga mereka mempertimbangkan background pendidikan dan *track-record* selama menjadi selebriti. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa modal budaya juga menjadi penting untuk selebriti dapat menduduki posisi legislatif.

Sebagai tambahan, kedudukan aktor di lapangan ditentukan oleh jumlah modal yang telah dikumpulkan aktor selama kariernya. Semakin besar modal yang dimiliki seorang selebriti, semakin baik posisi mereka di industri tersebut. Distribusi modal Verrell Bramasta yang cukup tinggi di semua kategori modal membuka peluang baginya untuk mendulang suara dalam kompetisi elektoral yang berlangsung selama pemilihan parlemen. Dalam ranah politik, pada hakekatnya memiliki kekuatan tersendiri berupa kemampuan menarik masyarakat untuk terjun ke dunia politik. Partisipasi selebriti dalam dunia politik dikaitkan dengan sejumlah strategi berbeda untuk mendapatkan pendapat masyarakat. Namun, hal ini tak lebih dari upaya memperebutkan modal tertentu dan akses yang dekat dengan pimpinan pemerintahan. Menurut Boudieu, keadaan ini tidak lebih dari adanya habitus. Karena habitus tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur dan agen, keadaan ini membuka jalan bagi para aktor untuk menggunakan berbagai macam strategi. Taktik yang digunakan dikenal sebagai "mempertahankan posisi" (atau "mengubah distribusi modal dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan"), dan ini dilakukan dengan salah satu dari dua cara.

Menurut Bourde, modal simbolik adalah yang paling signifikan dari berbagai jenis modal dalam hal memperoleh pengakuan, otoritas, dan rasa hormat, yang semuanya termasuk dalam proses legislatif yang melibatkan seniman. Modal simbolik termasuk dalam proses legislatif. Hal ini disebabkan modal simbolik tidak hanya dapat bertindak sebagai saluran melalui mana pemahaman dapat diperoleh, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengkomunikasikan makna. Seseorang yang dipuji oleh masyarakat karena kemampuannya yang luar biasa dibandingkan dengan orang lain disebut sebagai "bintang", yaitu sistem lambang yang dibuat oleh media massa. Memiliki kemampuan dalam beracting, *modelling*, *perform*, dan *public speaking*, selain memiliki penampilan yang selalu mencolok. Kualitas luar biasa dari memiliki karisma digambarkan oleh Weber sebagai akumulasi dari kemampuan individu seseorang. Weber mendefinisikan karisma sebagai sifat yang dimiliki seseorang.

Menurut aliran pemikiran Weber, magnetisme memiliki potensi untuk berkontribusi pada hubungan kekuasaan. Orang-orang yang memancarkan daya tarik dipandang sebagai calon pemimpin (Khasanah, 2019). Menurut Bourdieu, karisma adalah aspek individu yang berkontribusi pada modal simbolik mereka. Modal simbolik ini dapat ditransformasikan menjadi domain kekuasaan, tetapi bukan karena terkenal, melainkan karena terkenal. Ini dimungkinkan karena ketenaran mereka. Ketika orang-orang terkenal memasuki politik, fenomena ini disebut sebagai transformasi modal simbolik ke dalam domain kekuasaan. Verrell Bramasta yang berkacamata mampu melihat modal sosial yang satu ini, yang berperan sebagai modal dalam proses penciptaan pemikiran kolektif. Secara umum diyakini bahwa memakai kacamata adalah tanda kehebatan intelektual. Keadaan ini tidak lebih dari kesempatan untuk menciptakan citra diri seseorang yang tanggap dan pantas untuk terlibat. Orang-orang yang sudah akrab dengan selebriti dan memandang mereka sebagai panutan kemudian dipaksa oleh keadaan ini untuk memilih panutan selebriti mereka sendiri.

Ketika sistem simbol direkayasa secara lebih efektif, ia memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menarik, meyakinkan, dan mengarahkan perilaku orang. Sebagai hasil dari apa yang telah dikemukakan sejauh ini, domain dapat diinterpretasikan sebagai tempat yang sangat dinamis di mana pertarungan dan perjuangan terjadi. Ini memberikan analisis mendalam tentang kepribadian, kemampuan, dan dinamika kekuatan yang muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan berbagai taktik dalam berbagai pengaturan. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari akumulasi atau pertukaran berbagai jenis modal.

Dalam memenangkan pemilu, modal sosial menjadi komponen penting. Dalam bentuknya yang paling dasar, modal sosial berkontribusi pada pembentukan modal manusia. Oleh karena itu, modal sosial memiliki tujuan yang bermanfaat. Mustahil bagi seseorang untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hal keuntungan atau prestasi moneter jika mereka kekurangan modal sosial. Namun, keunggulan modal sosial hanya terlihat dalam konteks tertentu (Santoso, 2020). Istilah yang paling tepat menggambarkan situasi ini adalah "popularitas", artinya mengacu pada popularitas yang tersebar luas atau popularitas dalam jaringan organisasi. Namun, ini tidak menjamin bahwa orang-orang yang populer di masyarakat akan naik ke kekuasaan politik. Rekam jejak, sejarah, prestasi, dan kinerja baik yang langsung dirasakan oleh masyarakat semuanya berkontribusi pada popularitas. Dalam konteks ini, modal sosial mengacu pada kemampuan kandidat untuk memupuk hubungan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kandidat harus memahami bahwa otoritas diperoleh, sebagian, sebagai hasil dari kepercayaan. Seseorang atau kumpulan orang yang benar-benar dapat dipercaya atas dasar kepercayaan publik dapat diperoleh melalui penggunaan kepercayaan sebagai sarana untuk mencapai posisi otoritas, dan ini dapat dicapai melalui penggunaan kepercayaan (Febrian, 2022). Sangat mudah bagi orang untuk kehilangan kepercayaan pada mereka yang berwenang jika mereka merasa bahwa kekuasaan telah disalahgunakan. Pemenang kompetisi akan ditentukan oleh kandidat yang paling berpengaruh, yang meliputi kepribadian dan reputasi kandidat, pengalaman pendidikan, dan pekerjaan. Ini karena kandidat perlu memiliki pengaruh untuk mengembangkan hubungan dengan publik dan mendapatkan kepercayaan mereka.

Penguatan Kelembagaan Partai Amanat Nasional

Partai politik menyediakan mekanisme bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Mekanisme ini dapat digunakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Ada pasang surut dalam penerapan sistem kepartaian di Indonesia, dari tanda-tanda awal pembentukan partai tunggal dan ganda hingga realitas penerapan multi partai saat ini (Syaputra, 2020). Pada masa pemerintahan Orde Baru, total ada tiga partai politik yang beroperasi dalam sistem kepartaian Indonesia. Namun, dalam praktiknya, hanya satu partai politik yang mendominasi dalam memegang kekuasaan.

Untuk memastikan kelangsungan demokrasi dan keamanan politik, ilmuwan politik memandang partai politik sebagai alat penting untuk mengendalikan keterlibatan warga secara umum. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, yang tidak memiliki partai politik sama sekali, keputusan politik utama dibuat oleh keluarga penguasa dan para penasihatnya. Baru-baru ini partai politik menjadi signifikan di Afghanistan, yang merupakan negara di mana para pemimpin etnis mendominasi struktur politik (Syaputra, 2020). Amerika Serikat mensponsori sejumlah pemilu di Afghanistan, dan salah satunya adalah pembentukan partai untuk pertama kalinya. Hingga tahun 2005, Yoweri Museveni memegang kekuasaan tertinggi di Uganda, yang mengakibatkan negara tersebut tidak memiliki partai politik yang diakui. Setelah berkuasa, rezim militer otoriter di Amerika Latin dan Afrika kerap melakukan pembatasan terhadap aktivitas partai politik di negaranya masing-masing (Ethridge & Handelman, 2008).

Sangat penting untuk membentuk partai politik untuk mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Partai politik harus berperilaku secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan terbangunnya budaya politik (Setiadi, 2018). Saat ini kelembagaan partai politik di Indonesia mengedepankan antara lain: 1) ideologi partai sebagai landasan, pemahaman ideologi dan sikap politik, serta komitmen terhadap tujuan politik yang diinginkan; 2) demokrasi internal, yang dapat dilihat dalam pelaksanaan peraturan dan prosedur, pengambilan keputusan, desentralisasi sumber daya dan

pengawasan pelaksanaan kekuasaan, serta model seleksi dan kepemimpinan yang berjalan; 3) sistem kaderisasi, meliputi sistem rekrutmen yang jelas dan program kaderisasi; 4) keterpaduan internal, yang menyangkut kemampuan untuk menyelesaikan konflik internal; 5) hubungan konstituen; dan 6) otonomi keuangan, yang menyangkut kesinambungan dan pengelolaan sumber pendanaan.

Oleh karena itu, partai politik memenuhi fungsi penting sebagai syarat yang diperlukan untuk administrasi pemerintahan suatu negara yang demokratis. Sebagai gambaran, mesin politik yang mengatur Indonesia memandang partai politik sebagai landasan utama dibangunnya demokrasi. Singkatnya, kita tidak dapat berbicara tentang sistem demokrasi yang berfungsi tanpa adanya partai politik. Mengingat hal ini perlu, setiap anggota partai politik harus selalu dan secara memadai mengusahakan pembentukan keadaan yang menguntungkan dan fungsional bagi partai tersebut. Sebuah partai politik yang kuat dan berhasil mungkin saja menumbuhkan kondisi yang menguntungkan untuk pengembangan kader dan pelaksanaan kontrol masyarakat. Selain itu, keberadaan partai politik yang kuat dan mampu berfungsi secara efektif memiliki tujuan lain: membantu menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat sehingga dapat dicapai kompromi yang positif antara masyarakat dan pemerintah (Khotimah & Muwahid, 2022).

Kehadiran partai politik merupakan sesuatu yang harus dirasakan terlepas dari ada atau tidaknya pemilu berlangsung karena mereka tidak hanya hadir di depan persaingan legislatif tetapi juga hadir di setiap waktu untuk memberikan advokasi dan pemberdayaan di tengah masyarakat. Tidaklah cukup hanya memiliki perwakilan di arena politik; sebaliknya, signifikansi organisasi politik dapat diukur dari aktivitas politik aktual yang mereka lakukan di lapangan. Fungsi politik kader partai yaitu mengadvokasi dan memberdayakan masyarakat akan berhasil jika didukung oleh struktur organisasi partai yang berjenjang. Struktur ini bertujuan agar aspirasi rakyat dapat dengan mudah tersampaikan ke pusat kekuasaan, dan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dapat dengan mudah disebarluaskan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, struktur organisasi partai politik yang bergerak dari pusat ke daerah, bukan menjadi sarana pembenaran manajemen pusat untuk tujuan hegemoni atau dominasi politik kader partai di daerah, sehingga elit nasional dapat melakukan kontrol penuh atas kebebasan mengelola partai di tingkat daerah. Dalam praktiknya, demokrasi kepartaian membuka peluang bagi anggota partai di daerah untuk mengembangkan potensi politiknya, dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas bersifat unik dan kontekstual.

Visibilitas selebriti di mata publik berpotensi menyuntikkan semangat baru ke lanskap politik Indonesia. Roster artis, menurutnya, memenuhi persyaratan keanggotaan DPR RI dan memungkinkan masuknya "modal popularitas" yang nantinya bisa mendulang suara kelak (Akbar, 2021). Keadaan ini tidak lebih dari muncul sebagai pemenang dari persaingan dalam pemilihan kepala daerah, terlepas dari ideologi partai seseorang. Ketika dihadapkan pada persaingan politik, partai politik cenderung terlibat dalam pragmatisme dan politik komersial, sementara ideologi, visi, dan misi mereka secara bertahap menyusut. Selebriti sering diajukan sebagai kandidat oleh partai politik karena alasan pragmatisme yang mendesak. Hal ini disebabkan fakta bahwa selebriti harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diterima oleh pemilih pada waktu yang cepat. Akan lebih mudah bagi selebriti untuk berhasil daripada bagi para kader-kader yang mungkin harus melakukan upaya tambahan karena fakta bahwa pejabat memiliki akses ke sumber daya sosial dan keuangan. Oleh karena itu, orang-orang popularitas dipilih karena posisinya yang strategis, sehingga layak dipertimbangkan sebagai calon penyelenggara suara partai meskipun persaingannya sangat ketat.

Namun demikian, ketergantungan partai-partai politik pada pribadi-pribadi lebih dari sekadar pembentukan keberadaan partai-partai itu sendiri. Semua partai politik di Indonesia memiliki klausul dalam konstitusi atau pasal yang menyatakan bahwa anggota partai memiliki kewenangan untuk membentuk otonomi partai. Namun dalam praktiknya, hampir semua organisasi politik Indonesia masih

diperintah oleh segelintir orang yang berkuasa. Pengurus pusat dan daerah, ketimbang rapat umum, lebih berperan dalam menentukan pengurus dan nama calon anggota DPR dan DPRD, presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta menentukan kebijakan partai politik. Hal ini berlaku baik dalam hal penentuan nama calon jabatan tersebut, maupun penetapan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pada Rapat Umum Anggota.

Keberadaan partai politik, yang berfungsi sebagai basis yang sangat vitalpun bagi setiap sistem politik demokrasi, memberikan dukungan substansial pada tingkat pelembagaan yang ada dalam sistem tersebut (Rachim, 2016). Tetapi juga bukan rahasia lagi bahwa ketika elit dan partai didominasi oleh keinginan, keserakahan, dan ambisi buta yang menutup nalar, negara dan masyarakat pada umumnya tidak punya pilihan selain menerima malapetaka. Tak heran jika muncul pandangan-pandangan yang kritis dan skeptis terhadap para partai politik.. Menurut sudut pandang yang berbeda, partai politik tidak lebih dari platform politik yang digunakan oleh sejumlah kecil pemimpin politik untuk mendapatkan keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. (Liata, 2020).

Hal ini disebabkan partai politik pada masa itu menggunakan proses elektoral sebagai medan pertarungan distribusi kekuasaan dan pengejaran kekuasaan. Ketika orang dalam politik ini terpilih untuk menduduki posisi di pemerintahan atau sebagai wakil rakyat, mereka segera mulai fokus pada bagaimana mereka dapat melanggengkan diri mereka dalam posisi tersebut dan bagaimana mereka dapat menggunakan dana negara untuk menopang partai mereka daripada berjuang untuk aspirasi masyarakat. Sebagai akibat langsung dari hal ini, banyak ideologi politik dan landasan sosial yang seharusnya diperjuangkan oleh partai-partai ini, sebaliknya, semakin menghilang dengan sendirinya. Partai-partai ini seharusnya memperjuangkan ideologi dan aspirasi rakyat (Ristryawati, 2019). Oleh sebab itu, gabungannya Verrell Bramasta ke Partai Amanat Nasional tidak lain karena kepemilikan persona, bukan ideologi.

Selain itu, pengaruh selebriti sebagai *vote getter* telah berubah dengan munculnya media baru. Wasito Raharjo Jati, peneliti di pusat penelitian politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengungkapkan dalam wawancara di acara Narasi Daily bahwa fungsi *vote getter* telah berubah dari waktu ke waktu. Sebagai hasil dari media sosial, audiens bermigrasi dari artis yang konvensional sekarang lebih bergeser pada aktor baru yang sedang naik daun. Artis hanya dijadikan pendograk popularitas dan ekeltabilitas partai semata dan ini menjadi sebuah realitas sosial di dunia perpolitikan. Popularitas selebriti digunakan untuk menggalang dukungan dari para pemilih. Dengan bantuan basis penggemar mereka, partai politik telah secara efektif menciptakan mesin partai baru. Dari pernyataan tersebut bahwa, para partai hanya mempertahankan kekuasaan di parlemen dengan bergerak menjadi *match all party* dan tidak lagi memperjuangkan ideologi partai politik. Hal ini karena, untuk mencapai batas minimum *parlementary threshold* sebesar 4%.

Akibatnya dengan mementingkan persona pada artis, menjadikan ideologi partai politik menjadi melemah. Ideologi dapat dijelaskan baik dari segi struktur maupun fungsinya. Dimungkinkan untuk memahaminya dalam arti fungsional sebagai kumpulan gagasan tentang kesejahteraan umum, serta gagasan tentang masyarakat dan negara, yang dianggap paling baik (Surbakti, 2010). Di sisi lain, ideologi dapat dipahami dalam pengertian struktural sebagai sistem rasionalisasi yang terdiri dari gagasan dan formulasi politik yang digunakan untuk menjelaskan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Pemahaman ideologi ini memungkinkan seseorang untuk memahami ideologi memiliki dimensi politik (Ristryawati, 2019). Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila, rakyat memahami arah perjuangan partai-partai. Dengan perbedaan ideologi masing-masing partai, pemilih akan dengan mudah memilih partai politik yang paling mewakili nilai-nilai mereka.

Ada kalanya ideologi yang diterbitkan secara resmi oleh AD/ART tidak mewakili ideologi yang dianut oleh partai tersebut. Nyatanya, aktivitas sejumlah besar organisasi politik tidak sesuai dengan

doktrin yang beredar saat ini. Tidak selalu mudah untuk menentukan filosofi yang mendasari berbagai organisasi politik. Hal ini disebabkan ideologi banyak organisasi politik tidak disajikan secara terbuka dan transparan dalam bentuk yang telah ditetapkan. Karena memintangkan persona seorang selebriti, berpotensi menimbulkan banyak perbedaan pendapat di antara anggota kelompok kooperatif, yang membuat metode pemerintahan tidak efektif. Karena perbedaan pendapat yang begitu tajam, kompleksitas perumusan kebijakan akan meningkat jika kesamaan ideologis diabaikan. Ini akan berpengaruh pada seberapa efektif kebijakan tersebut. Terutama dalam situasi di mana ideologi bukan merupakan faktor dalam perekrutan, hal itu akan mmeunculkan pengkhianat. Hal ini disebabkan ketidakstabilan dalam kelembagaan partai dapat ditelusuri kembali ke asal-usulnya, sehingga memudahkan identifikasi komponen-komponen yang bermasalah. Kegagalan partai politik dalam menjalankan sistem kaderisasi, ideologi, dan fungsi instruksi politik bagi pemimpin dan pemilih, salah satunya berdampak pada semakin pentingnya fungsional. Efek lainnya adalah kegagalan partai politik dalam mendidik pemilih. Kepraktisan yang ada di dalam partai akan, dengan cara yang sama seperti arus sebab-akibat yang tidak terputus, akan mengurangi agresivitas anggota (Imansyah, 2012).

Naturalisasi kader partai politik dari satu partai ke partai lain dewasa ini menunjukkan bahwa partai politik mengalami volatilitas dalam pola rekrutmen dan kaderisasi politik serta gagal menanamkan ideologi partai pada bawahannya. Naturalisasi kader partai politik ini terjadi ketika individu-individu dalam partai politik keluar dari partai asalnya untuk bergabung dengan partai politik lain. Masuknya Verrell Bramasta secara tiba-tiba ke dalam daftar keanggotaan partai politik turut menimbulkan pesimisme masyarakat secara umum terhadap partai politik. Partai politik memiliki kecenderungan untuk menarik kandidat berdasarkan karakter mereka daripada memilih anggota yang benar-benar terdidik dan mengalami proses hidup di dalam partai, dari melewati masa-masa sulit hingga mencapai tujuan partai. Hal ini menimbulkan pola rekrutmen dan pola Kaderisasi Anggota Partai Politik yang kurang loyal dan berkualitas dibandingkan anggota partai lainnya.

Hakikatnya, ada prosedur pendahuluan, yang dikenal sebagai prosedur *recruitmen*, yang harus diselesaikan sebelum seseorang dapat secara resmi bergabung dengan suatu partai. Pemimpin atau orang-orang dalam proses ini dapat dilahirkan kembali melalui prosedur ini dengan harapan bahwa mereka akan lebih siap untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Terkadang perekrutan untuk mendapatkan pesaing suara Partai politik hadir dengan asa yang dibawa. Secara khusus, dengan memberikan banyak optimisme, menjelaskan bagaimana mewujudkannya, dan mengidentifikasi jenis masyarakat yang akan menjadi dasar perjuangan apakah petani, pekerja, nelayan, penduduk kota, atau penduduk pedesaan, dll.

Dalam situasi seperti ini penting bahwa sebagai hasil dari proses revitalisasi yang dilakukan oleh partai politik, akan muncul calon-calon pemimpin yang telah dinilai kemampuan teoritis atau filosofisnya serta pengalaman praktisnya dalam konteks organisasi maupun dalam masyarakat. (Yudhi, 2011). Bisa dikatakan bahwa partai politik adalah tempat dihasilkannya tenaga-tenaga kerja yang nantinya dapat berpotensi menjadi pemimpin masa depan baik di tingkat nasional maupun lingkungan. Ketika bangsa kita dilihat sebagai versi organisasi yang disederhanakan, posisi pemimpin menjadi hal yang paling penting. Keputusan kemudian akan muncul dari pemimpin ini yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi (negara) (Boangmanalu & Sembiring, 2022). Kader-kader dari inilah yang kemudian menciptakan representasi partai politik dalam kaitannya dengan ideologi, Tujuannya, ketika kader partai ini akhirnya menjadi pemimpin, mereka akan mampu membuat kebijakan yang sejalan dengan ideologi partai, bukan kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai. Prinsip ini tentunya berlaku tidak hanya untuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat berupa presiden, tetapi juga berlaku bagi gubernur, walikota, atau bupati. Selain itu, harus ada derajat kedaulatan daerah dimana daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangga guna

membangun masyarakat yang sejahtera. Karena pemimpin daerah memiliki kekuasaan yang begitu besar, hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi partai politik untuk mempraktekkan ideologi partainya di berbagai daerah melalui kebijakan yang berlaku.

Penting bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi karena hal itu merupakan landasan untuk meneruskan perjuangan partai politik di masa mendatang. Untuk membangun sistem tenaga kerja yang mampu menopang dirinya sendiri secara finansial dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, regenerasi merupakan prasyarat yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan akan transmisi pengetahuan politik sangat penting mengingat pentingnya kaderisasi. Pengetahuan ini tidak hanya harus berkaitan dengan sejarah, tujuan, visi, dan strategi organisasi politik, tetapi juga harus berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut negara (Purnawati, 2017). Dalam proses revitalisasi juga dimungkinkan untuk mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan pemerintah. Tujuan pembentukan kader di lingkungan partai politik adalah untuk melatih individu-individu yang bersedia menjadi tongkat estafet perjuangan partai politik. Orang yang telah mendapat pelatihan dan persiapan dalam berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk memperebutkan jabatan publik melalui mesin pemilu disebut sebagai anggota partai politik. Metode transparan yang menjamin akses kepada setiap dan seluruh calon pegawai wajib diterapkan berbarengan dengan pola pengkaderan. Selain itu, penting untuk membangun sistem persaingan dalam organisasi politik yang jujur dan terbuka. Karena pemimpin masa depan yang kompeten akan dapat dihasilkan melalui peremajaan jika sistem persaingan bebas dari konspirasi dan pilih kasih.

Dalam proses rekrutmen artis calon anggota parlemen di Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menjadi rahasia umum bahwa system tertutup digunakan dalam proses seleksi bagi mereka yang akan menduduki jabatan di internal partai. Pada hakikatnya adalah tentang rekrutmen calon legislatif, siapa pun yang berkomitmen pada empat dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia boleh bergabung, terlepas dari apakah mereka memahami ideologi di balik gerakan tersebut atau tidak. Di sisi lain, dalam contoh khusus ini, selebriti terjun ke politisi bukan berdasarkan ideologi. Sebab, partai tidak lagi memiliki kader ideologis dan hanya mengandalkan popularitas kader. Terlebih di era personalisasi politik yang dimana kekuatan personal lebih diutamakan dari pada ideologis. Sehingga dari hal ini akibatnya, para pemimpin organisasi politik tidak memiliki karakter atau visi negara yang diperlukan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi negara ini. Dalam praktiknya, proses perekrutan pemimpin partai biasanya sangat menekankan unsur-unsur yang terkait dengan hubungan transaksional. Karakter anggota tidak lagi menjadi perhatian partai politik yang ada. Sebaliknya, partai menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada jumlah surat suara yang mereka terima dalam pemilu (Purnawati, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan rasionalitas partai politik, dalam penelitian ini, partai memiliki kemampuan untuk memutuskan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi calon pemimpin, dan juga dapat memutuskan siapa yang pantas menduduki posisi itu. Menjelang pemilihan umum, mayoritas partai politik saat ini melakukan berbagai taktik kampanye menjelang pemilihan umum untuk menggalang dukungan. Modal politik juga menunjukkan bahwa tujuan partai adalah untuk memberikan pintu masuk bagi para calon, terutama kader non-partai, sementara partai-partai yang sudah ada tidak menutup kemungkinan bisa menjadi celah masuk. Oleh karena itu, partai politik mencari kandidat dengan dukungan elektoral dan pendanaan politik. Modal sosial yang sudah dimiliki selebriti adalah satu-satunya faktor terpenting dalam kemunculan mereka di dunia politik. Karena itu, Partai Amanat Nasional memutuskan untuk mengajukan Verrell Bramasta sebagai caleg. Partai tersebut menilai bahwa popularitas Verrell Bramasta akan membantunya mengumpulkan suara saat bersaing dengan kandidat lain di pemilu mendatang. Dalam hal ini rasionalitas Partai Amanat Nasional dalam memilih legislator didasarkan

pada *electoral figure*. Akan tetapi dengan keterlibatan selebriti di dunia politik ini terjadi dikarenakan proses pelembagaan partai yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Partai politik memiliki kecenderungan untuk terlibat dalam politik praktis dan transaksional akibat merosotnya keunggulan ideologi, visi, dan misi dalam kontestasi politik. Inilah prinsip fundamental di balik memenangkan kontes di pilkada terlepas dari ideologi partai yang mencalonkan diri. Selain itu, keikutsertaan selebriti dalam ranah politik lebih mementingkan persona dari pada ideologi, padahal ideologi secara fundamental memainkan peran penting dalam pelembagaan partai politik untuk memastikan demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). *Artis dan Partai Politik Studi Pencalonan Artis-Artis Sebagai Calon Legislatif Oleh Partai Nasdem Pada Pemilihan Legislatif 2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Amin, M. (2018). *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik (Inspirasi Sumatera Utara)*. USU Press: Medan.
- Amsariah, S. (2022). Islam and Communist Power Relation in Najib Al-Kailani's 'Adzra Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 28(2), 267–284. <https://doi.org/10.15408/bat.v28i2.25082>
- Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. *Lex Journalica*, 1(2), 77–89.
- Aziz, A., & Tamala, E. (2019). *REAKTUALISASI PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK*. PT GRAMASURYA: Yogyakarta.
- Boangmanalu, S., & Sembiring, A. B. (2022). Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat). *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2), 102. <https://doi.org/10.24114/jk.v19i2.30402>
- Bourdieu, P. (1995). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: University of Cambridge.
- Chandra, A., & Ansori, Z. (2019). Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(2), 49–66. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37.
- El-Haddad, A. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 91–101.
- Ethridge, M. E., & Handelman, H. (2008). *Politik Dalam Dunia yang Berubah*. Yusron, L. (Penerjemah). Bandung: Nusa Media.
- Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 120–160.
- Febrian, R. K. (2022). PENGGUNAAN MODALITAS CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA PEKANBARU PERIODE 2019-2024. *JOM FISIP*, 9(2).
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Habibie, M. I. (2009). *Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamiruddin. (2021). Survei Dan Konsultan Politik: Membangun Popularitas Dan Elektabilita Politik. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(1), 1–18.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375–395.
- Jannah, A. I. (2023). *DOMINASI SIMBOLIK (Studi Tentang Interaksi Kuasa Bangsawan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bonto Tappalang Kabupaten Bantaeng)*. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna

- Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34(4), 1–87.
- Khasanah, U. (2019). *Pelunturan Muslim Kota Terhadap Kyai (Studi Pandangan Komunitas Warga Nahdliyin Dusun Papringan Terhadap Otoritas Kyai Pada Masa Kontestasi Politik*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Khotimah, K., & Muwahid. (2022). KEBERADAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI BENTUK PELEMBAGAAN DEMOKRASI. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 1–17.
- Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), 79–95. <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483>
- Lindawati, D. S. (2014). Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2014. *Politica*, 4(2), 287–312.
- Moita, S., Supiyah, R., & Monto, L. O. (2018). Model Penguatan Orientasi Politik Pemilih Dalam Pilkada Secara Langsung di Kabupaten Konawe. *Social and Political Challenges in Industrial 4.0*, 346–367.
- Mukaromah, K., & Alfirdaus, L. K. (2022). POLITIK KELUARGA DAN POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020. *REFORMASI*, 12(1), 41–51. <https://doi.org/10.33366/rfr.v>
- Mustikasari, M., Arlin, & Kamaruddin, S. A. (2023). Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(1), 9–14.
- Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>
- Nendissa, R. H., & Rahakbauw, C. P. I. (2020). Transparansi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Legislatif. *SASI*, 26(1), 119–127.
- Ni'mah, M. (2015). TRANSFORMASI SELEBRITI MENJADI POLITISI: URGENSI PERSONAL FRONT DALAM RANAH SOSIAL. *INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi V*, 45(2).
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nugroho, K. W. (2018). *Sederet Artis Terkenal yang Bergabung Jadi Kader PAN*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-artis-terkenal-yang-bergabung-jadi-kader-pan/full>
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–11.
- Purnawati, L. (2017). PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung). *Publiciana*, 10(1), 1–25.
- Putra, A. W. (2022). *Rasionalitas Partai Politik Dalam Menentukan Calon Kepala Daerah (Dodi Reza Alex Noerdin – Beni Hernedi) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Palembang.
- Rachim, A. (2016). Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi. *Selisik*, 2(4).
- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 710–120. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. Pusataka Saga: Jakarta.
- Sastrawati, N. (2020). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>
- Setiadi, W. (2018). PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIS. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1).

- Sianturi, K. A. (2018). Memperkuat Fungsi Rekrutmen Partai Politik (Strengthening The Recruitment Function Of Political Party). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Sitompul, C. (2018). KONFLIK INTERNAL PARTAI SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KOMPLEKSITAS SISTEM MULTIPARTAI DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1).
- Somantri, G. R. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Makara, Sosial Humaniora*, 9(2), 57–65.
- Suardi, S. (2017). Mencermati Pilihan Rakyat Antara Popularitas Dalam Integritas Semu. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(2), 69. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5544>
- Supriyanto. (2016). *MODAL SOSIAL DAN KAPITAL DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Calon legislatif DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang)*.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo: Jakarta.
- Syaputra, M. Y. A. (2020). Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 111. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08>
- Yudhi, P. (2011). Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30–40.
- Yusra, A., Widya, G., Brin, G., Jend, J., Subroto, G., Widya, G., Brin, G., Jend, J., & Subroto, G. (2022). SELEKSI KANDIDAT DALAM KONTESTASI ELEKTORAL : STUDI KASUS PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TAHUN 2005 DAN TAHUN 2020 CANDIDATE SELECTION IN ELECTORAL CONTESTATIONS : Pendahuluan. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 1–22.